19 Tahun Perjuangan

Petani Lahan Pantai-Kulon Progo

"Generasi Tanpa Batas Pertahankan Tanah Lawan Kezaliman"

LAHAN MENGHIDUPI
TAMBANG HARUS MATI
KAMI ADALAH ENERGI

PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI - KULON PROGO





Majalah Masyarakat dan Lingkungan "19 Tahun Perjuangan Petani Lahan Pantai - Kulon Progo"

Editor: **Cex**

Dosen Pengampu:
Dr. Dermawan Waruwu,S.Th.,M.Si., Dra. Endah Setyowati, M.Si., M.A.r

Penulis:
Cex

Desain & Tata Letak:
Cex

Beberapa dokumentasi dan ilustrasi milik pribadi/istimewa. Untuk mengakses majalah online silahkan scan QR code di halaman depan.

Selamat membaca

Latar Belakang

Bergenerasi menanam, mengelola lahan dan merawat tanaman yang memberi manfaat bagi kehidupan.

Konflik agraria di Kulon Progo berawal sejak tahun 2005, ketika pemerintah daerah dan perusahaan tambang berencana mengeksplorasi pasir besi di kawasan pesisir selatan.

Padahal, lahan tersebut telah lama dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

Bagi petani, lahan pasir bukan sekadar tempat bercocok tanam — melainkan sumber kehidupan dan identitas kolektif.

Mereka menanam cabai, semangka, dan palawija di tanah yang oleh banyak orang dianggap “tidak produktif”.

Namun, rencana eksploitasi tambang pasir besi membawa ketegangan, bahkan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek tersebut.

Kronologi dan Bentuk Kriminalisasi

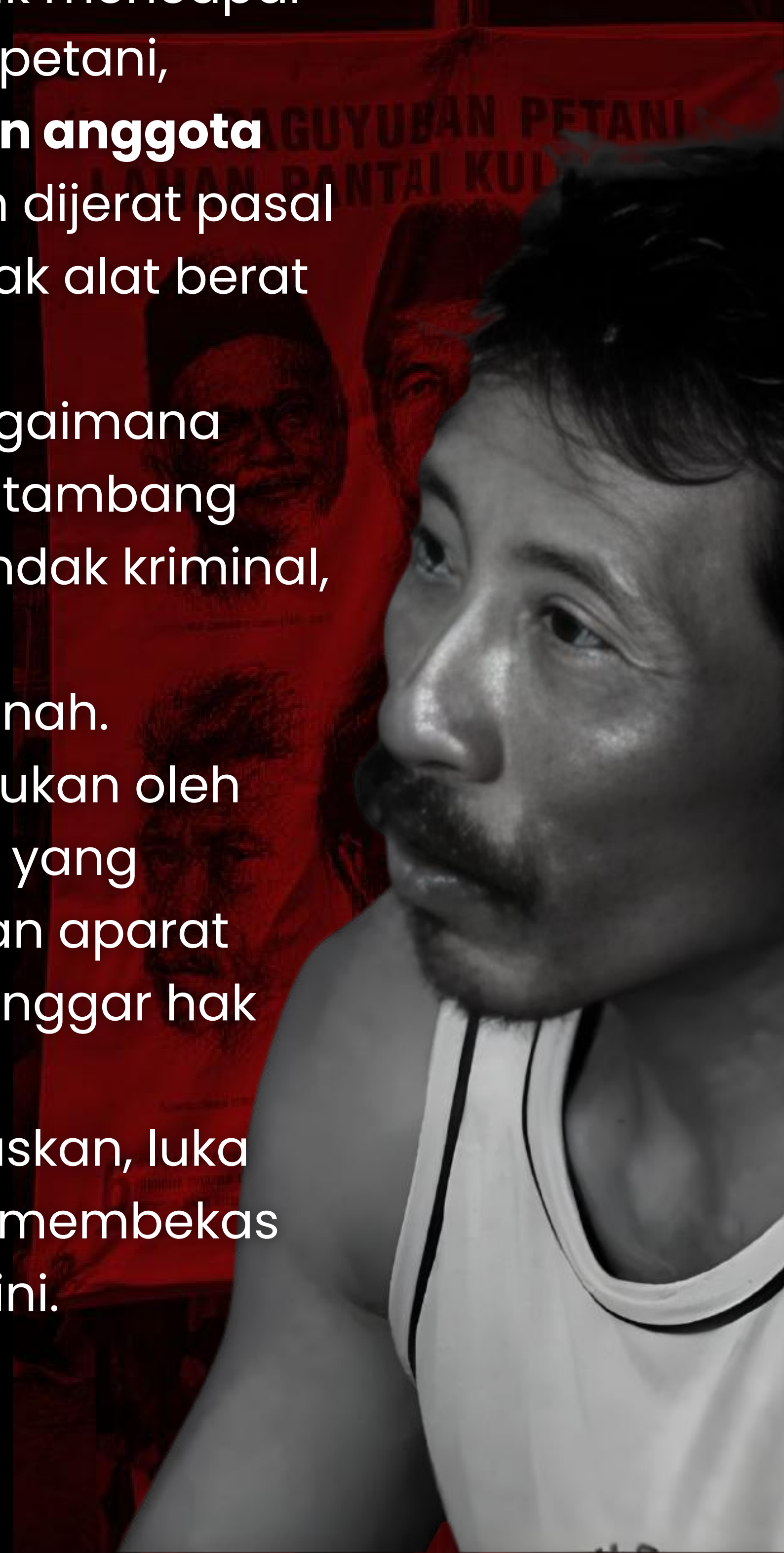


Pada tahun **2010–2017**, konflik mencapai puncaknya. Sejumlah tokoh petani, termasuk **Tukijo, Slamet, dan anggota PPLP lainnya**, ditangkap dan dijerat pasal penghasutan karena menolak alat berat memasuki lahan mereka.

Kasus ini menjadi simbol bagaimana penolakan terhadap proyek tambang sering ditafsirkan sebagai tindak kriminal, bukan sebagai ekspresi hak konstitusional warga atas tanah.

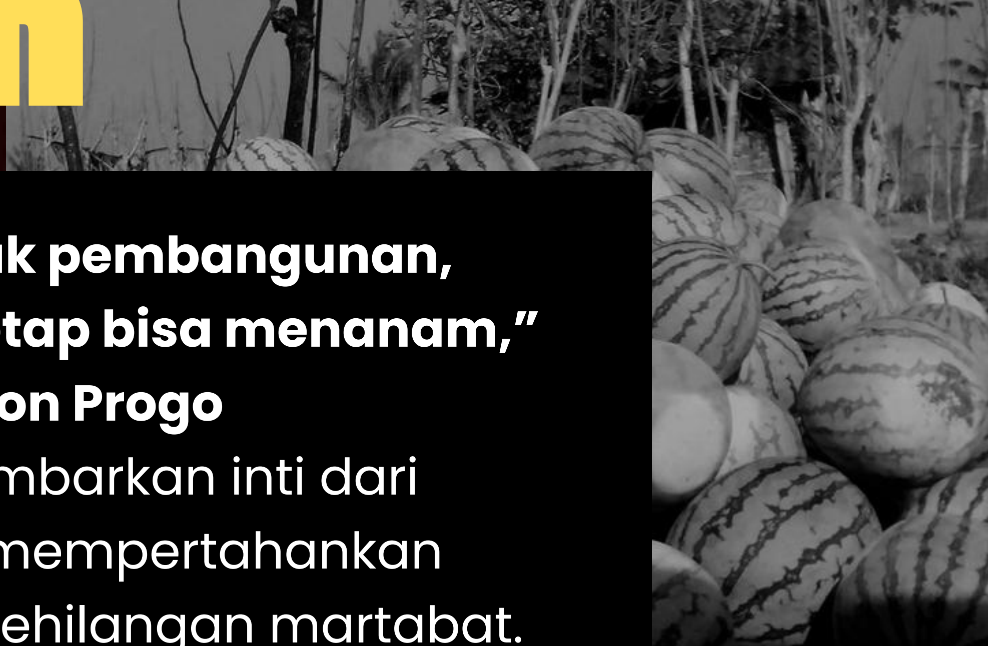
Pendampingan hukum dilakukan oleh **LBH Yogyakarta dan WALHI**, yang menegaskan bahwa tindakan aparat tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia.

Meski akhirnya Tukijo dibebaskan, luka sosial dan rasa takut masih membekas di kalangan petani hingga kini.



Suara dari Lahan



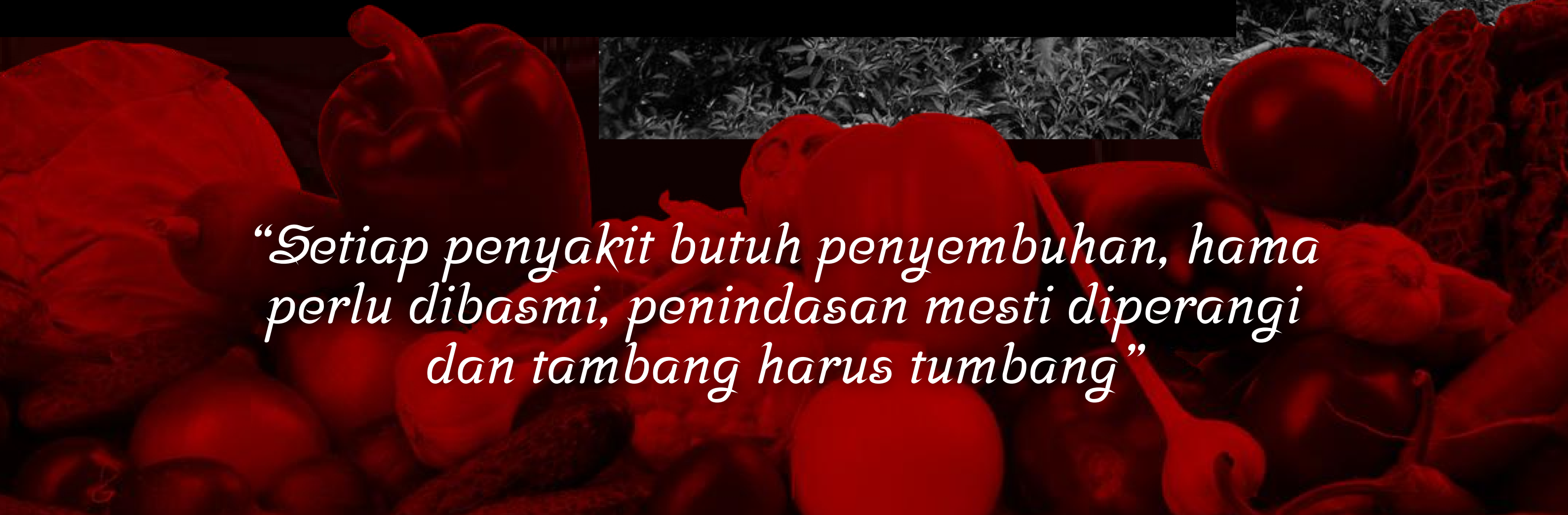


“Kami tidak menolak pembangunan, kami hanya ingin tetap bisa menanam,”
— Tukijo, Petani Kulon Progo

Kutipan itu menggambarkan inti dari perjuangan petani: mempertahankan ruang hidup tanpa kehilangan martabat.

Gerakan petani Kulon Progo menjadi inspirasi bagi banyak kelompok tani lain di Indonesia yang menghadapi situasi serupa, di mana proyek tambang dan infrastruktur sering mengorbankan keberlanjutan lingkungan serta hak rakyat kecil.





“Setiap penyakit butuh penyembuhan, hama perlu dibasmi, penindasan mesti diperangi dan tambang harus tumbang”

Analisis Studi Humanitas

Dari perspektif kami Studi Humanitas, konflik agraria di Kulon Progo memperlihatkan relasi kuasa antara negara, kapital, dan masyarakat lokal. Rencana tambang pasir besi membawa logika ekonomi ekstraktif yang menempatkan alam sebagai komoditas, bukan ekosistem sosial. Sementara itu, petani menegaskan paradigma berbeda: tanah sebagai sumber kehidupan dan ruang sosial yang diwariskan secara kolektif.

"Tanah milik rakyat bukan milik korporat"

"Kami belajar mengatasi hama, menolak rencana tambang, mempertahankan tanah dan lawan kezaliman penguasa"

Dampak Sosial dan Ekologis

- Ekologis: Risiko abrasi meningkat karena eksploitasi pasir mengubah morfologi pantai.
- Sosial: Ketegangan antarwarga dan trauma akibat intimidasi aparat.
- Ekonomi: Hilangnya sumber penghidupan bagi keluarga petani yang menggantungkan hidup dari lahan pasir.
- Kultural: Tergesernya nilai-nilai gotong royong dan solidaritas antarpetani.

Kesimpulan

Kasus kriminalisasi petani Kulon Progo adalah cermin dari tantangan agraria di Indonesia: ketika kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Perlawanan petani Kulon Progo bukan sekadar soal menolak tambang, tetapi tentang mempertahankan kehidupan yang berkeadilan.
Majalah ini berharap bisa menjadi ruang refleksi: bahwa pembangunan sejati harus tumbuh dari bumi yang adil — bukan dari tanah yang dirampas.

"Kehidupan petani ditentukan oleh petani, begitupun masa depan kami ditentukan oleh kami sendiri.

Paguyuban Petani Lahan Pantai - Kulon Progo



Daftar Pustaka

Andalas, U. (2023, Mei 15). Petani Kulon Progo Menolak Tambang Pasir Besi: Antara Ketahanan Pangan dan Investasi. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/15/petani-kulon-progo-menolak-tambang-pasir-besi

Gandhi, A. (2022). Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani di Pesisir Selatan Yogyakarta. Jurnal Agraria Nusantara, 10(2), 101–118. https://doi.org/10.31219/osf.io/agranus2022

Mongabay Indonesia. (2021, Desember 3). Petani Kulon Progo dan Perlawanan Terhadap Tambang Pasir Besi. https://www.mongabay.co.id/2021/12/03/petani-kulon-progo-dan-perlawanan-terhadap-tambang-pasir-besi

Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. (2020). Arsip Gerakan Petani Lahan Pantai: Kronologi Penolakan Tambang Pasir Besi. Yogyakarta: PPLP Publishing.

Santoso, H., & Widodo, T. (2024). Tambang Pasir Besi dan Dampak Sosial Ekologis di Kulon Progo. Jurnal Pembangunan Sosial dan Lingkungan, 15(1), 45–60.

Tempo.co. (2024, April 10). Kriminalisasi Tokoh Petani Kulon Progo dan Ketimpangan Agraria di Indonesia. https://nasional.tempo.co/read/kriminalisasi-petani-kulon-progo

Walhi Yogyakarta. (2023). Laporan Tahunan Advokasi Agraria: Konflik Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Yogyakarta: WALHI DIY.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, atas kesediaannya berbagi kisah dan dokumentasi perjuangan.

WALHI Yogyakarta dan LBH Yogyakarta, atas kerja advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat pesisir.

Rekan-rekan mahasiswa dan dosen mata kuliah Masyarakat dan Lingkungan yang membantu dan terus memperjuangkan keadilan agraria di Indonesia.

“Viva La Vida!!!”